

Uji Kompetensi Kebijakan Vokasi Sekolah Kejuruan terhadap Dunia Industri Link and Match Vocational School Policy Towards The Industrial World

M. Arief Budiman¹, Nanik Kustiningsih²
27ariefbudiman@gmail.com¹, nanik@stiemahardhika.ac.id²
STIE Mahardhika

Abstrak

Sehubungan dengan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia yang sedang berlangsung, khususnya program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, terdapat fokus untuk membangun Penggalan Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Industri. Pendidikan kejuruan secara khusus disusun untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di sektor industri. Motivasi penelitian ini berawal dari isu pengangguran di kalangan individu yang berpendidikan tinggi yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi SMK agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Mengimplementasikan metodologi kualitatif, khususnya mengadopsi strategi kompetensi, untuk menyelidiki secara menyeluruh faktor yang mendasari masalah pengangguran. Selain itu, studi ini juga berupaya untuk mengeksplorasi potensi efektivitas kebijakan Kompetensi sebagai opsi yang layak untuk mengatasi masalah ini. Temuan yang didapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan hubungan dan penyalarsan, khususnya terkait dengan pendekatan Penggalan kompetensi yang ada di SMK. Melalui strategi tersebut, SMK dapat memastikan kompetensi yang paling dalam pasar tenaga kerja, serta mengidentifikasi kompetensi yang paling diminati oleh pasar tenaga kerja.

Kata Kunci: Kebijakan, Kompetensi, Pendidikan Kejuruan, Dunia Industri

Abstract

In connection with the ongoing initiatives of the Government of the Republic of Indonesia, especially the programs implemented by the Directorate General of Vocational Education, there is a focus on building Vocational High School (SMK) and Industrial Competency Extraction. Vocational education is specifically structured to provide practical skills and knowledge that can be directly applied in the industrial sector. The motivation of this study originated from the issue of unemployment among highly educated individuals who received considerable attention from the public. Therefore, it is necessary to implement policies aimed at increasing the relevance of vocational schools to suit market needs. Implement qualitative methodologies, in particular adopting competency strategies, to thoroughly investigate the underlying factors of the unemployment problem. In addition, the study also seeks to explore the potential effectiveness of Competency policies as a viable option to address this issue. The findings obtained provide a comprehensive understanding of relationship and alignment policies, especially related to the competency exploration approach in SMK. Through this strategy, SMK can ensure the most competencies in the labor market, as well as identify competencies that are most in demand by the labor market.

Keywords: Policy, Competence, Vocational Education, Industrial World

PENDAHULUAN

Total angkatan kerja bulan Februari 2023 adalah 146,62 juta, bertambah 2,61 juta dari Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 0,24 poin. Pekerja yang terdampak belum mendapatkan akomodasi pekerjaan yang sesuai. Lulusan universitas

memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar yaitu 4,80% pada tahun 2022. Lulusan SMK menyusul dengan 9,42%, lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan 8,57%, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan 5,95%, dan lulusan sekolah dasar (SD) dengan 3,59%. Pada tahun 2020, 13,55 persen lulusan SMK bekerja, dibandingkan dengan 11,13 persen pada tahun 2021.

Siswa mendaftar di lembaga pendidikan dan memilih bidang studi tertentu dengan aspirasi untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja. Salah satu faktor penentu penting untuk mencapai kesuksesan di pasar tenaga kerja adalah kapasitas untuk secara efektif meningkatkan investasi pendidikan yang dilakukan selama masa sekolah untuk prospek pekerjaan di masa depan (Robst,2017). (Sloane, 2013).

Ketika seseorang dipekerjakan dalam peran yang berada di bawah tingkat pendidikannya, ada potensi pemanfaatan yang kurang dari bakat yang diperoleh melalui sekolah formal. Ketidaksesuaian pendidikan dapat terjadi dalam dua cara: ketidaksesuaian vertikal, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah pendidikan yang diperoleh dan persyaratan pekerjaan, dan ketidaksesuaian horizontal, yang mengacu pada ketidaksesuaian antara bidang studi yang dikejar dan profesi yang dijalani. Pentingnya fokus pada topik studi tertentu terletak pada kapasitasnya untuk memfasilitasi pemeriksaan keahlian yang beragam. Pendidikan, selain menanamkan sumber daya manusia yang luas, juga menawarkan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan tertentu dalam pasar tenaga kerja (Hersch, 2012; Walters, 2014)

Secara efektif adanya masalah ketidaksesuaian pendidikan sebagian besar berasal dari ketidaksesuaian pasokan tenaga kerja. Selain mengetahui penyebab utama ketidaksesuaian pendidikan, sangat penting untuk memastikan konsekuensi dari lulusan yang mengandung mismatch latar belakang pendidikan mereka. Memang, prevalensi ketidaksesuaian pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengangguran.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup besar dalam upayanya untuk menciptakan tenaga kerja yang cakap dan berkompentensi sesuai kebutuhan dunia kerja global, khususnya di industri. Tantangan yang ada mencakup dua dimensi utama: institusi pendidikan dan pasar tenaga kerja. Hal ini dapat dikaitkan dengan manajemen pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya kompetensi di antara para lulusan. Akibatnya, hal ini mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja terampil yang signifikan di empat sektor utama, yaitu maritim, pertanian, pariwisata, serta industri kreatif.

Kebijakan ini telah diimplementasikan dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan keselarasan antara SMK dengan kebutuhan tenaga kerja, sektor bisnis, dan industri. Peningkatan terhadap keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di tahun mendatang dengan berfokus pada penyediaan sumber daya menjadi pendekatan yang lebih selaras dengan permintaan pasar. Kebijakan ini mengandung dua tujuan yang berbeda, yang secara khusus menargetkan tingkat SMA dan SMK. Program Kementerian Pendidikan bertujuan untuk mengubah distribusi siswa antara SMA dan SMK dari rasio 70:30 menjadi 30:70. Di tingkat sekolah menengah, ada harapan bahwa industri akan secara aktif berkontribusi pada pengembangan program pelatihan khusus dan berkolaborasi dalam pendirian institusi khusus industri.

Pembentukan hubungan yang kuat dan keselarasan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja secara luas dipandang sebagai skenario yang ideal. Konsep ini bertujuan untuk

membangun hubungan yang mulus antara penyedia tenaga kerja dan mereka yang membutuhkannya. Universitas memiliki kapasitas untuk membangun kemitraan timbal balik di mana mereka dapat merancang kurikulum yang selaras dengan tuntutan dan persyaratan tenaga kerja. Aplikasi praktis dari kebijakan penggalian kompetensi diwujudkan dalam bentuk program magang. Tujuan dari program itu adalah untuk memastikan adanya keuntungan bersama bagi sektor ini dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Saat ini, terdapat persepsi umum bahwa program magang hanya menguntungkan institusi dan mahasiswa, sementara menyebabkan ketidaknyamanan bagi industri.

Berdasarkan premis bahwa peningkatan pengangguran dapat dikaitkan dengan kekurangan dalam sistem pendidikan, maka sangat penting untuk mengadopsi strategi khusus dalam bidang pendidikan. Secara khusus, konsep Peningkatan Kompetensi harus direvitalisasi dalam sistem pendidikan supaya mampu menciptakan keterkaitan yang berguna pada dunia pendidikan dan sektor industri. Dengan mengembangkan sistem pendidikan yang sukses di Indonesia, kualitas industri dapat ditingkatkan, dan sebaliknya, industri dapat secara aktif berkontribusi pada kemajuan pendidikan kejuruan dan teknik berbasis kompetensi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menyajikan manfaat dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

METODE PENELITIAN

Implementasi metode kualitatif dalam kerangka strategi yang meneliti berbagai elemen yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki, yang berfokus pada korelasi dan efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di kalangan pekerja terdidik. Penekanan yang signifikan ada pada kebijakan Peningkatan Kompetensi, dengan menelitinya sebagai kasus yang spesifik. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang relevan dan beragam, serta temuan-temuan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

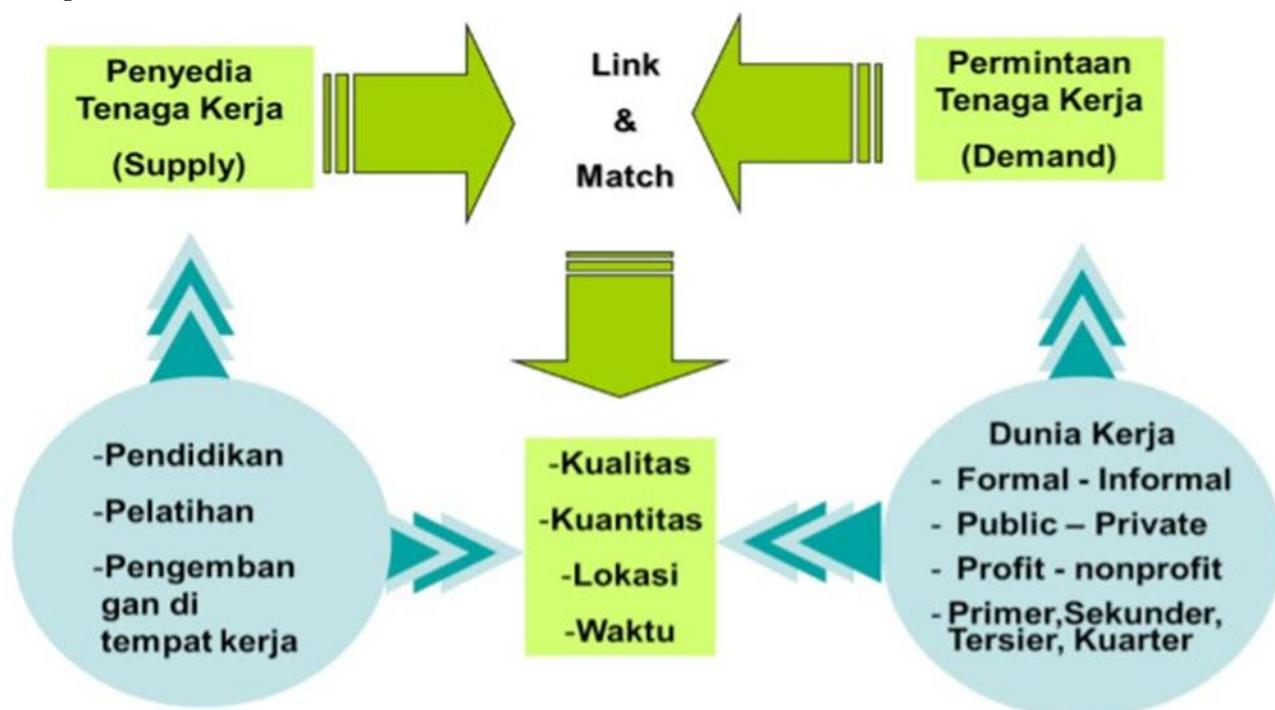
HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Peningkatan Kompetensi dimulai pada tahun 1989. Pemeriksaan data statistik menyajikan fakta adanya tingkat pengangguran yang signifikan, sejumlah besar lowongan pekerjaan yang tidak terisi, dan tingkat kompetensi pekerja yang rendah. Selain itu, analisis data sakernas, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian yang terus-menerus antara tingkat pendidikan dan persyaratan keterampilan di pasar tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini terutama terlihat di antara individu dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan individu dan kesempatan kerja yang sesuai telah terbukti berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk tingkat pendapatan, kepuasan kerja, dan tingkat perputaran pekerja. Konsekuensi-konsekuensi ini, pada gilirannya, telah diamati berdampak buruk pada produktivitas pekerja.

Penelitian terdahulu mengenai fenomena ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan. Penelitian-penelitian ini telah menunjukkan dampak signifikan dari ketidaksesuaian tersebut terhadap efektivitas pengeluaran yang dilakukan di sektor pendidikan publik dan swasta. Telah diamati bahwa ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan tidak hanya memengaruhi gaji tetapi juga berimplikasi pada berbagai keluaran dan hasil tenaga kerja.

Ketidakcukupan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dikaitkan dengan kendala keuangan, yang muncul dari pertumbuhan dan perubahan yang cepat dalam bisnis. Sebaliknya, sektor pendidikan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan ini. Selain itu, kurikulum tidak selaras dengan kondisi regional atau lokal yang spesifik. Selain itu, masalah penting yang muncul adalah tidak adanya koordinasi yang efektif antara lingkup Pendidikan dengan lingkup industri. Terdapat kekurangan penggambaran yang tepat dan tegas mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Perlu dicatat bahwa terdapat kelangkaan kesempatan kerja yang tersedia bagi individu yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Akibatnya, sejumlah besar dari mereka menjadi operator di berbagai industri, meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.

Berdasarkan temuan-temuan dari studi tersebut di atas, jelaslah bahwa masih ada banyak area yang harus diupayakan perbaikannya oleh pemerintah. Aspek awal menunjukkan korelasi yang kuat dengan aspek-aspek berikutnya. Dengan kondisi yang ada, apakah kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan link and match, dapat diimplementasikan dalam skenario ini.



Gambar 1 Konsep Link and Match

Idealnya, keberhasilan implementasi program Peningkatan Kompetensi memerlukan keterlibatan tiga komponen utama secara simultan: Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Tinggi, sektor korporasi, dan pemerintah. Jika implementasi strategi ini berhasil, akan didapat manfaat dari penurunan tingkat pengangguran, terutama di antara individu. Krusial bagi Pemerintah untuk secara tekun menjunjung tinggi keterkaitan antara dunia akademis dan dunia kerja, untuk memastikan transfer informasi yang efektif dari universitas ke dunia kerja. Hal ini idealnya akan meningkatkan keefektifan dan kemampuan program peningkatan kompetensi dan memuaskan untuk pemangku kepentingan yang terlibat.

Pendidikan formal maupun non-formal berusaha mencapai hasil yang optimal dan memberikan hasil yang memberikan pengaruh yang baik dalam dunia pendidikan dan

organisasi secara luas. Tujuan prioritas SMK adalah mengembangkan tenaga kerja dengan tingkat kemahiran, keahlian, dan keterampilan yang unggul (Gaeta, Lavadera, & Pastore, 2017). Tanggung jawab para pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan yang efektif agar selaras dengan tuntutan industri dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan meminimalisir pengangguran di antara lulusan SMK, seperti yang telah dibahas (Russo, 2017). Dalam lanskap kontemporer, sektor bisnis dan industri mengalami pertumbuhan eksponensial, yang secara konsisten didorong oleh keharusan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara SMK yang mendorong pengembangan Sumber daya manusia terampil untuk industri yang mencari tenaga kerja dengan kecakapan optimal.

Kebijakan pendidikan smp 2017 (dokor top, 140317)

Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016

No.	Bidang Keahlian	Lulusan SMK 2016	Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja	Kelebihan (+)/ Kekurangan(-)
1	Teknologi dan Rekayasa	441.561	611.644	170.083
2	Energi dan Pertambangan	3.486	27.008	23.522
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	277.545	327.813	50.268
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	60.944	68.245	7.301
5	Agribisnis dan Agroteknologi	52.319	445.792	393.473
6	Kemaritiman	17.249	3.364.297	3.347.048
7	Bisnis dan Manajemen	348.954	119.255	- 229.699
8	Pariwisata	82.171	707.600	625.429
9	Seni dan Industri Kreatif	12.017	88.133	76.116
TOTAL		1.296.246	5.759.787	4.463.541

1. Kekurangan lulusan terbesar adalah bidang perikanan dan kelautan, karena terhambat dengan aproval dari peraturan di kementerian Perhubungan;

2. Bidang TIK tumbuh sangat besar karena banyak calon guru yang bisa mengajar substansi TIK. Yang diperlukan adalah tataulang bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

3. Bidang Bisnis dan manajemen adalah yang berlebih lulusan, karena penyelenggaraannya mudah dan murah. Umumnya SMK yang dikelola masyarakat membuka bidang keahlian ini. Untuk itu perlu revitalisasi dan penataan ulang.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

“Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pendidikan Kejuruan” maka Pemerintah telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa kurikulum sekolah vokasi selaras dengan kebutuhan industri. Mengingat munculnya industri 4.0 yang menjadikan integrasi teknologi digital di semua tahap proses produksi, sangat penting bagi lulusan masa depan untuk memiliki kemampuan beradaptasi secara efektif dengan kemajuan teknologi ini dalam karir profesional mereka. Strategi Pemerintah untuk mencapai tujuan program peningkatan kompetensi yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada pengembangan yang berorientasi pada kualitas. Dunia pendidikan perlu membina kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam dunia kerja, termasuk industri.

Disamping kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas, keberhasilan implementasi program peningkatan kompetensi unggulan dapat dikaitkan pada kemampuannya untuk menghasilkan beberapa manfaat, termasuk peningkatan kemampuan siswa, peningkatan pengetahuan terkait pekerjaan dan kemahiran dalam sains dan teknologi, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam persaingan kerja.

Strategi dalam mewujudkan kebijakan Peningkatan Kompetensi

Menurut Jusuf Enoch (1992: 90), di banyak negara, ada keyakinan yang berlaku bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan dan penyediaan tenaga kerja yang mahir untuk memfasilitasi kemajuan di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya bagi para perencana pendidikan untuk melakukan upaya dalam menilai kuantitas dan kualitas tenaga kerja untuk pembangunan nasional. Secara teoritis, pendekatan ini menekankan pada korelasi antara lulusan sistem pendidikan dan persyaratan pasar tenaga kerja. Namun, pendekatan ini bukannya tanpa

keterbatasan. Ada tiga kelemahan utama. Pertama, memiliki peran yang terbatas dalam perencanaan pendidikan karena mengabaikan keberadaan SMA, yang dapat mengakibatkan pengangguran. Sebaliknya, pendekatan ini ada di SMK. Kedua, bergantung klasifikasi berdasarkan penawaran. Terakhir, tujuan dari pendekatan ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tanpa memperhatikan fakta bahwa permintaan pasar tenaga kerja berkembang dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan zaman (Usman, 2012:59).

Menurut Soesilowati (2009), teknik dasar yang diperkirakan mampu diperoleh dari kategorisasi menyeluruh dari kesulitan link and match.:

- 1) Penting untuk melakukan evaluasi dan restrukturisasi yang komprehensif terhadap berbagai instrumen hukum yang beragam, yang mencakup peraturan daerah interaksi dan keselarasan antara pendidikan tinggi dan industri. Dalam skenario khusus ini, titik fokus utama berkaitan dengan kerangka kerja legislatif dan SOP yang mengatur keharusan kolaborasi, serta dampaknya, di dalam ranah pendidikan tinggi, sektor industri dan badan-badan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.
- 2) Untuk membangun hubungan antar lembaga dan memastikan kewenangan mereka, sangat penting untuk mengidentifikasi badan-badan pemerintahan yang relevan, seperti Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kadin, dan berpotensi membentuk entitas baru yang mewakili tiga pihak yang disebutkan di atas. Proses ini harus dilakukan dalam kerangka hukum, termasuk sumber untuk mendukung inisiatif seperti program CO-OP yang sudah ada dan mitra-mitra regionalnya. Hal ini akan memungkinkan para lulusan untuk membangun perusahaan mereka sendiri dan menciptakan peluang kerja.
- 3) Pendekatan lainnya adalah dengan menerapkan penegakan hukum, untuk memastikan bahwa semua upaya untuk meningkatkan kompetensi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, sehingga memudahkan pelaksanaannya secara efektif.
- 4) Untuk mengurangi surplus tenaga kerja berpendidikan tinggi, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan tujuan mendorong pertumbuhan investasi di sektor-sektor yang sedang berkembang.

KESIMPULAN

Melalui pemanfaatan Peningkatan Kompetensi, Pendidikan Kejuruan dapat memastikan kompetensi utama yang dicari oleh pasar tenaga kerja, serta mengidentifikasi kompetensi yang paling banyak diminati di pasar tersebut. Metodologi yang digunakan untuk mengimplementasikan peningkatan kompetensi mencakup pendekatan sosial dan pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan. Pendekatan sosial adalah kerangka kerja teoritis yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat dan mempromosikan akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Pendekatan ketenagakerjaan adalah strategi yang menekankan pada hubungan antara lulusan sistem pendidikan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peran pendidikan formal dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah diakui secara luas, dan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terletak pada produktivitas tenaga kerja. Diasumsikan bahwa tingkat kualitas pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu teknik penting untuk meningkatkan Kompetensi adalah pembentukan kerangka hukum yang disertai dengan sanksi yang mengatur keefektifan hubungan

kolaboratif yang terukur, komprehensif, dan bertahan lama antara kompetensi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Faberman, R. J., & Mazumder, B. (2012). Is there a skills mismatch in the labor market? The Federal Reserve Bank of Chicago, 4(3), 40–55.
- Gaeta, G. L., Lavadera, G. L., & Pastore, F. (2017). Much Ado about Nothing? The Wage Penalty of Holding a PhD Degree but Not a PhD Job Position. *Research in Labor Economics*, 10(1), 243–277.
- Handel, M. J. (2014). Skills Mismatch in the Labor Market. *Annual Review of Sociology* JSTOR, 29(135), 65–76. Hersch, J. (2012). Education Match and Job Match. *The Review of Economics and Statistics*, 73(1), 650–664.
- Holzer, H. J. (2013). Skill Mismatches in Contemporary Labor Markets: How Real? And What Remedies? *School of Public Policy*, 1(2), 1–10.
- Iammarino, S., & Marinelli, E. (2014). Education-job (mis)match and interregional migration. Italian university graduates' transition to work. *EuroLIO Geography of Innovation*, 4(3), 54–76.
- Indar, D. (2014). *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya* (5th ed.). Surabaya: Karya Aditama.
- Mcgowan, M. A., & Andrews, D. (2015). *The Future Of Productivity: Main Background Papers Labour Market Mismatch And Labour Productivity: Evidence From Piac Data*. Economics Department Working Papers No 1209, 27(1), 1–51.
- Mf, R., Senarath, S. A. C. L., & Patabendige, S. S. J. (2014). Job-Education Mismatch Among the Graduates: A Sri Lankan Perspective. *Ruhuna Journal of Management and Finance*, 1(2).
- Robst, J. (2017). Education and job match: The relatedness of college major and work. *Economics of Education Review*, 26, 397–407.
- Robts, J. (2013). Career Mobility, Job Match and Over education. *Eastern Economic Journal*, 21(4).
- Russo, G. (2017). Job Design and Skill Development in the Workplace. *Research in Labor Economics*, 5(4), 409–445.
- Sloane, P. J. (2013). Much Ado About Nothing? What Does The Over-Education Literature Really Tell Us? *Overeducation in Europe: Current Issues in Theory and Policy*, 45(3), 234–254.
- Soesilowati, E. S. (2009). *Link And Match Dunia Pendidikan Dan Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Industri*. Jakarta: LIPI Press, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Usman, H. (2012). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walters, D. (2014). The Relationship Between Post secondary Education and Skill: Comparing Credentialism with Human Capital Theory. *The Canadian Journal of Higher Education*, 90(2), 97–124.